

BRI SEDIAKAN KUR UNTUK TKI PLAFON Rp. 60 JUTA

Jumat, 17 September 2010 10:03

JAKARTA: Pemerintah memperluas jangkauan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan menyediakannya bagi tenaga kerja Indonesia (TKI) dengan plafon maksimal hingga Rp60 juta.

Direktur Utama PT Bank BRI Tbk Sofyan Basir menjelaskan besaran KUR diberikan bervariasi, mulai dari Rp15 juta untuk pekerja tanpa keahlian (unskilled) hingga Rp60 juta untuk pekerja dengan keahlian (skilled), seperti perawat dan teknisi. Skema KUR tersebut bertujuan agar para TKI tidak terjebak oleh para rentenir di negara lain.

"Tergantung pendidikan mereka di sana dan besaran gaji yang diterima. Lama kredit berkisar antara 12-36 bulan cicilan. Itu akan dipotong langsung perusahaan di sana dan dibayarkan ke bank pemberi pinjaman melalui PJTKI [Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia]," ujarnya sesuai acara penandatanganan nota kesepahaman KUR III di kantor Kemenko Perekonomian, hari ini.

Biasanya, lanjutnya, TKI rela menjual tanah atau investasi yang dia miliki demi melunasi kewajiban segala macam pembayaran sebelum ditempatkan. Contohnya untuk mengurus paspor, visa, pengurusan surat-surat hingga cadangan biaya hidup selama tiga bulan pertama.

"Kebutuhan KUR bagi TKI ada dan nyata. Selama ini kebutuhan mereka di-cover oleh bunga tinggi atau rentenir," katanya.

Untuk itu, Sofyan mengatakan pihaknya dan sejumlah bank nasional lainnya akan bekerjasama dengan PJTKI untuk meminimalisir risiko penyaluran KUR bagi TKI. PJTKI akan memonitor keberadaan para TKI sehingga remittance bisa berjalan dengan baik.

Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa menuturkan kebijakan tersebut dilakukan untuk mempermudah TKI yang akan bekerja di luar negeri sekaligus mendorong adanya

pinjaman yang lebih terukur. Hal ini untuk menghindarkan hal-hal yang dapat membebani TKI, seperti permasalahan pembiayaan sebelum penempatan.

"Ini adalah salah satu skema baru dalam pembiayaan KUR. Saya harap perbankan bisa turut merespons ini, tetapi intinya adalah bagaimana membantu TKI yang sudah mendapatkan izin untuk bekerja di luar negeri. Biasanya mereka butuh dana untuk mengurus macam-macam. Akibatnya mereka terbebani dana yang dipotongkan dari pendapatan mereka," tuturnya.

Terkait dengan itu, Hatta menambahkan pemerintah memutuskan untuk meningkatkan penjaminan KUR, dari yang sebelumnya hanya 70% menjadi 80%. (yn)

Sumber : www.ekon.go.id